

**EVALUASI KINERJA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN DALAM PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PENDIDIKAN PADA TINGKAT SMP DI KABUPATEN SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI**

RASYID ANNAHRI

NPP. 30.0313

JAMBI

Program ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH

Email: rsyd08@gmail.com

ABSTRACT

Problems/Background (GAP): This research discusses the quality analysis of websites in public information services in the city of Mataram, West Nusa Tenggara Province. The main concepts used in this research are the quality of the website and the public information service. The quality of websites is seen as an important factor in providing public information that is easily accessible and understood by the public. Public information service is the responsibility of the government to provide easy and fast access to information to the public. **Purpose:** The aim of this research is to find out to what extent the quality of the website Communication and Informatics Department of the City of Mataram in delivering public information. The research location for researchers to obtain data is the Communication and Informatics Department of the West Nusa Tenggara Province. **Method:** The methodology used in this research is qualitative descriptive method with data collection techniques through observation, interview and document study. Data sources are primary data and secondary data. Data analysis is carried out using descriptive analysis techniques and qualitative analysis. **Results/Findings:** The results of the research showed that the quality of the website of the Ministry of Communications and Informatics of the City of Mataram in the Public Information Service has been quite well seen from the three dimensions of Alvaro Rocha's theory of content quality, service, and technical dimensions. Some of the problems found include a lack of socialization towards society, insufficient IT managers/networks, and cyber attacks that are still likely to occur at all times. **Conclusion:** Based on the findings, the study recommends that the municipal government of the city of Mataram socialise more intensively related to the Diskominfo website of the West Nusa Tenggara Province, carry out work evaluations, recruitment of human resources, and improve the security of the website. This is expected to increase accessibility and effectiveness in providing public information services to the public.

Keywords: Quality, Website Diskominfo Kota Mataram, Public Information, Societ

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama di kabupaten sarolangun dengan meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pelaksanaannya. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana

kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun dalam memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama agar dapat di evaluasi sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Kabupaten Sarolangun. **Metode:** Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode deskriptif melalui pendekatan induktif. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian. **Hasil/Temuan:** Kemudian hasil penelitian dianalisa melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil evaluasi kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun dalam pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan sudah berjalan cukup baik dimana ketepatan dan manfaat pelaksanaan dimana Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sarolangun merasakan dampak positif karena meningkatnya kualitas pendidikan yang dilihat dari jumlah Sekolah Menengah Pertama yang terakreditasi semakin bertambah. **Kesimpulan:** Namun masih terdapat beberapa kendala yang menghambat pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sarolangun, seperti pelaksanaan yang belum sesuai dengan perencananya yang dikarenakan kurangnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik sehingga berdampak dengan tidak meratanya tenaga pendidik dan banyak tenaga pendidik yang menjalankan tugasnya tidak sesuai kompetensinya dan kurangnya sarana dan prasarana yang ada sehingga memperlambat jalannya proses pembelajaran, masih adanya anak yang putus sekolah dan masih buta aksara sehingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sarolangun masih belum bisa memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan.

Kata Kunci: Evaluasi, Standar Pelayanan Minimal, Pendidikan, SMP

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pendidikan akan memperhitungkan tren global terkait kemajuan pesat teknologi, pergeseran sosio-kultural, perubahan lingkungan hidup, dan perbedaan dunia kerja masa depan, dalam bidang pendidikan pada setiap tingkatan menyadari akan pentingnya pendidikan nasional, pemerintah terus berupaya memenuhi hak setiap warga negaranya dalam memperoleh layanan pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia. (Bappenas 2020) Hal ini tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang mewajibkan pemerintah bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan taraf pendidikan penduduk di Indonesia, salah satunya melalui program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun terdiri dari SD dan MI atau bentuk lain yang sederajat serta SMP dan MTs atau bentuk lain yang sederajat. Kualitas pendidikan pada jenjang tertentu tidak dapat terlepas dari kualitas pada jenjang di bawahnya. Pendidikan dasar merupakan pondasi 2 untuk pengembangan ke jenjang Sekolah Menengah Atas dan Perguruan Tinggi. Tanpa mengikuti pendidikan dasar, anak tidak dapat menempuh pendidikan pada jenjang berikutnya. Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan juga harus dimulai pada peningkatan mutu pendidikan dasar. Keberhasilan peserta

didik pada jenjang pendidikan dasar sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan yang ada. Dengan demikian, pemerintah harus tanggap agar dapat mengembangkan kompetensi guru sebagai pendidik khususnya pada jenjang Pendidikan Dasar. Sadar akan pentingnya kompetensi guru dalam menentukan keberhasilan pendidikan nasional, maka pemerintah menetapkan standar dalam pelayanan pendidikan dasar. Standar tersebut disebut dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Menurut Sabdaningtyas (2018:3) “Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga sebagai salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang merata dalam Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama”. Standar Pelayanan Minimal merupakan tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan yang diselenggarakan daerah. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyelenggarakan pendidikan berdasarkan SPM sesuai dengan Permendikbudristek No 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Standar pelayanan minimal adalah sebuah kebijakan publik yang mengatur mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sebagai sebuah kebijakan, standar pelayanan minimal sudah selayaknya didukung oleh peraturan perundang-undangan yang memadai mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah ataupun peraturan menteri terkait.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

masih banyaknya kebutuhan guru pada mata pelajaran tertentu dan kelebihan dimata pelajaran tertentu sehingga guru dengan kualifikasi yang berbeda harus mengisi jam tersebut, hal ini menjadi hambatan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidik pada tingkat SMP di kabupaten Sarolangun. Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang bisa diidentifikasi yaitu, antara lain: Masih kurangnya jumlah tenaga pendidik (guru) pada tingkat SMP Kabupaten Sarolangun., Tidak Meratanya tenaga pendidik (guru) pada tingkat SMP di Kabupaten Sarolangun. Dan Masih belum terpenuhinya kualifikasi Pendidikan Tenaga Pendidik (Guru) dan berbedanya kualifikasi terhadap mata pelajaran yang diajar. Dengan sejumlah masalah tersebut , maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan judul “EVALUASI KINERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DALAM PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN PADA TINGKAT SMP DI KABUPATEN SAROLANGUN”

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, penelitian Khorina Nuryani tahun 2014 (Nuryani, 2014) berjudul EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR SD UNGGULAN MUHAMMADIYAH KRETEK KABUPATEN BANTUL TAHUN AJARAN 2013/2014 menyatakan bahwa Hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar oleh SD Unggulan Muhammadiyah Kretek berdasarkan indikator pencapaian yang telah memenuhi SPM sebesar 72,42% dan belum memenuhi SPM sebesar 27,58%. sekolah dan peran guru, sekolah harus menyusun, memonitoring dan mengevaluasi Rencana Kegiatan Sekolah yang terdiri dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah dan Rencana Kerja Tahunan. Penelitian Laila Nur Rosyidah tahun 2016 (Rosyidah, 2016) berjudul STUDI IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET B DI KOTA MAGELANG menyatakan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari berbagai indikator standar pelayanan minimal dalam aturan Permendiknas 129a/U/2004 hanya 45 persen saja yang memenuhi standar pelayanan minimal yang ada. Lulusan dari pendidikan kesetaraan yang melanjutkan pendidikan berjumlah 20 persen, 70 persen memilih untuk bekerja, sedangkan yang 10 persen tidak melapor. Penelitian Pangihutan Jonathan tahun 2016 (Jonathan, 2016) berjudul EVALUASI PROGRAM STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR

SDN 10 KEDAUNG KALIANGKE JAKARTA BARAT menyatakan bahwa Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar oleh SDN 10 Kedaung Kaliangke berdasarkan indikator pencapaian yang telah memenuhi SPM sebesar 92,50% dan belum memenuhi SPM sebesar 7,50%. SPM belum terpenuhi dalam hal jumlah jam per minggu pembelajaran, penerapan RPP, Program Penilaian dan keterlibatan komite sekolah dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT). Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan SPM ini yaitu kurangnya informasi yang diterima sekolah mengenai SPM, kualitas SDM baik guru maupun kepala sekolah masih kurang dan kurangnya efektivitas pelaksanaan program sekolah. Penelitian Sri Wulan Pilomonu tahun 2014 (Pilomonu, 2014) berjudul **EVALUASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI MADRASAH IBTIDAIYAH MUHAMMAD UGGULAN KOTA GORONTALO** menyatakan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Standar isi sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku, hal ini terlihat pada penerapan KTSP, adanya kegiatan remedial untuk semua mata pelajaran, serta penyusunan kalender pendidikan. 2) Standar proses telah memenuhi kriteria sesuai dengan prosedur, hal tersebut dapat terlihat dari penyusunan perangkat pembelajaran seperti silabus dan RPP yang dibuat oleh masing-masing guru kemudian ditindaklanjuti kegiatan evaluasi dan supervisi. 3) standar kompetensi lulusan, sudah memenuhi kriteria sesuai dengan SPM hal ini terlihat dari adanya menentukan KKM di setiap mata pelajaran. 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, sudah berjalan sesuai dengan prosedur dalam SPM hal ini terlihat dari tenaga pengajar yang mencapai 98% berpendidikan sarjana.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Landasan teori merupakan bagian dari penelitian yang memuat teori-teori dan hasil-hasil penelitian yang berasal dari studi kepustakaan yang memiliki fungsi sebagai kerangka teori untuk menyelesaikan pekerjaan penelitian. Landasan teori juga sering disebut kerangka teori.

Landasan teoritis adalah komponen dari penelitian yang memuat teori dan hasil dari penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang mempunyai fungsi sebagai kerangka teori untuk menyelesaikan tugas penelitian. Landasan teori juga sering disebut kerangka teori.

Keirangka teori terdiri atas konsep dan juga definisi dan redefinisi untuk literatur ilmiah yang relevan, teori tersebut dipakai untuk studi atau penelitian. Keirangka teoritis wajib memperlihatkan pemahaman tentang teori dan konsep yang sesuai dengan topik penelitian kita dan yang berkaitan dengan bidang pengetahuan lebih luas yang sedang dipertimbangkan.

Sugiyono (2010 : 54) mengatakan bahwa “landasan teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proporsi yang disusun secara sistematis”. Suatu penelitian baru tidak bisa terlepas dari penelitian yang terlebih dahulu sudah dilakukan oleh peneliti yang lain.

1.5 Tujuan.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun dalam memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama agar dapat dievaluasi sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Kabupaten Sarolangun.

II. METODE

Metode penelitian adalah pola pikir yang dianut peneliti dalam merumuskan desain penelitian dan melakukan penelitian. Dengan tujuan untuk mengetahui dan mengembangkan

suatu gejala ke dalam bentuk gagasan untuk peneliti menentukan metode penelitian dengan desain konsep dan prosedur dalam penelitian, yang terdiri dari tahapan, asumsi, metode pengumpulan data, analisis dan interpretasi, memungkinkan perencanaan yang maksimal. Desain penelitian merupakan semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Berdasarkan arti yang lebih sempit, desain penelitian hanya mengenai pengumpulan data dan analisis data. Beirg (2001:5). penggunaan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif bertujuan agar penelitian ini berfokus untuk menggambarkan kejadian yang terjadi di lapangan secara sistematis, logis dan objektif sehingga dapat memahami setiap fakta yang terjadi dapat memecahkan permasalahan yang ada menggunakan metode ilmiah. Pada penelitian ini peneliti mendeskripsikan pengukuran kinerja standar pelayanan minimal pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar Pelayanan Minimal merupakan salah satu kebijakan prioritas nasional yang akan menjadi tolak ukur untuk digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sekaligus sebagai kontrol terhadap kinerja pemerintah daerah dalam melayani masyarakat. Untuk itu pemerintah daerah diharapkan mampu menyelenggarakan urusan wajib secara lebih sesuai dengan yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal masing-masing sesuai petunjuk Kementerian/Lembaga terkait dan dapat memprioritaskan pendanaan pelaksanaan daerah dalam belanja daerah dan wajib melaporkan penerapan Standar Pelayanan Minimal, karena hasil penerapan Standar Pelayanan Minimal akan digunakan untuk merumuskan kebijakan nasional sebagai pertimbangan pemberian insentif dan disinsentif. Salah satu kinerja dari Dinas Pendidikan adalah penerapan Standar Pelayanan Minimal pada tingkat SMP yang berjumlah 80 SMP di Kabupaten Sarolangun yang terbagi di 11 kecamatan. Pada evaluasi ini lebih fokus pada upaya melihat sejauh mana layanan yang disediakan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan pada tingkat SMP. Basis evaluasi teknis didasarkan pada ketentuan standar mutu yang ditetapkan oleh masing-masing OPD pengampu Standar Pelayanan Minimal.

Evaluasi Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan

Efektivitas

Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan seberapa sukses suatu kegiatan atau sistem yang terlatih sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi secara efektif, efektivitas juga merupakan suatu perbandingan antara realisasi dan target. Adapun beberapa indikator efektivitas yang penulis ambil dan digunakan sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan yaitu perencanaan dan pelaksanaan.

A. Perencanaan

Perencanaan diartikan sebagai usaha untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang dilakukan dengan tujuan melaksanakan suatu kegiatan atau program sehingga dapat . Dapat dilihat dari hasil wawancara dan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan standar pelayanan minimal pendidikan pada tingkat SMP dilaksanakan berdasarkan aturan undang undang yang berlaku dan mengacu pada tahun sebelumnya agar ditahun berikutnya dapat dilaksanakan lebih baik.

Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah metode yang menggambarkan cara atau alur penyelesaian pekerjaan secara sistematis yang membuat langkah-langkah atau urutan pelaksanaan suatu kegiatan

disertai uraian dan pengoperasian setiap jenis teknik untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bapak Helmi, S.H., M.H Pada hari senin, 9 januari 2023 pada pukul 10.30 WIB. Kemudian rasio guru terhdap peserta didik yang melebihi 100% yaitu ada diangka 150% dimana hal ini berarti tidak seimbang jumlah guru dan siswa yang perlu disesuaikan, akan tetapi untuk angka putus sekolah semakin kecil semakin baik dan disini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun berhasil menekan angka tersebut hingga 14%, kemudian angka melanjutkan sekolah ke SMP sudah sangat baik di 99%, dan terakhir presentase SMP yang terakreditasi mencapai 100% yang berarti semua SMP yang ada di Kabupaten Sarolangun sudah terakreditasi. Berdasarkan data dan hasil wawancara pelaksanaan standar pelayanan minimal pendidikan SMP dilaksanakan berdasarkan target yang telah ditentukan disetiap tahunnya sehingga target tersebut harus tercapai agar dapat memenuhi standar.

Efisien

Efisien adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok organisasi untuk dapat mengurangi pemborosan penggunaan sumber daya lain, yaitu bekerja dengan sederhana namun tepat untuk memuaskan proses dengan hasil dan usaha yang tepat, sedangkan indikator dapat juga mendorong efisien sehingga standar pelayanan minimal dapat dilaksanakan dengan baik.

Pendayagunaan Sumber Daya Pelaksana

Salah satu indikator efisiennya pelaksanaan suatu program pelayanan yang diberikan kepada masyarakat adalah melihat dari pendayagunaan sumber daya pelaksana yang efisien. Semakin efisien pendayagunaan sumber daya pelaksana menjadi indikator bahwa pelayanan yang diberikan akan semakin efisien. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Kepala Bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga pendidikan Sutadi, S.Pd. total 359 sumber daya pelaksana yang ada di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Sarolangun dimana yang paling sedikit dan masih banyak kosong yaitu tenaga keaman yang hanya berjumlah 4 orang, *office boy* yang hanya berjumlah 2 orang, dan tukang kebun yang hanya berjumlah 6 orang, tenaga tenaga yang diperlukan tentunya harus dipenuhi disetiap kecamatan agar pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan pada tingkat SMP dapat terpenuhi. Pendayagunaan sumber daya pelaksana terdiri dari aspek yang ada pada lembaga pendidikan baik dari administrasi, keamanan, dan proses belajar mengajar yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang harus terpenuhi agar seluruh penerima pelayanan dapat terlayani agar dapat memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan yang telah ditetapkan.

Pendayagunaan Sumber Dana

Dalam pelaksanaan program kepada masyarakat salah satu indikator yang penting untuk diperhatikan adalah sumber dana yang digunakan. Sumber dana yang digunakan haruslah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, hal ini tentu agar pelaksanaan program yang diberikan kepada masyarakat dapat berjalan dengan maksimal. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Pendidikan bapak Zulhitmi, M.Pd.I . Sumber dana untuk SMP berasal dari pemerintah yang meliputi bantuan operasional sekolah yang biasa disebut dana BOS yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau yang biasa dikenal APBD setiap tahun dimana anggaran tersebut diberikan berdasarkan alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai aturan perundang undangan, dari data dan hasil wawancara terlihat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun mengeluarkan anggaran dengan efisien sesuai dengan program yang ada.

Kecukupan

Kecukupan dapat dipahami sebagai alternatif dengan hasil yang diinginkan sehingga pemecahan masalah dapat segera di atasi dengan mengambil tindakan sesuai dengan prosedur atau kebijakan, kecukupan dapat diperbaiki dengan melihat banyak indikator serupa dengan

kelangsungan sistem pemerintah, yaitu sumber daya yang didasarkan pada hasil permasalahan dalam kinerja pemerintah, apakah telah beroperasi sesuai peraturan perundang-undangan atau belum.

A. Jumlah Sumber Daya Pelaksana

Jumlah sumber daya pelaksana tentu harus diperhatikan agar program pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat tercukupi dengan maksimal. Jumlah sumber daya pelaksana yang ada harus sesuai dengan kebutuhan agar pelayanan yang diberikan dengan optimal. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Seksi formasi dan mutasi bapak Arief ade putra, S.E Dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa bidang yang masih belum terisi tenaga pendidiknya dikarenakan kurangnya lulusan pada bidang tersebut seperti TIK dan BK, sehingga sekolah kesulitan untuk memenuhi jumlah jam wajib pada mata pelajaran tertentu, dan yang terjadi guru yang kekurangan jam mengajar terpaksa mengajar pada bidang yang tidak sesuai dengan kualifikasinya guna untuk memenuhi jam wajib mengajarnya.

Kecukupan Sumber Daya Pelaksana

Kecukupan sumber daya pelaksana juga harus diperhitungkan dengan baik. Jika tidak maka pelaksanaan program yang diberikan kepada masyarakat tidak dapat berjalan dengan efisien. Akan banyak hambatan yang terjadi saat pelaksanaan. Oleh karena itu, sebelum melaksanakan program harus memperhitungkan kecukupan sumber daya pelaksana yang ada. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Seksi formasi dan mutasi bapak Arief ade putra, S.E Dari hasil wawancara dan data yang ada dapat disimpulkan bahwa tenaga kependidikan yang berstatus PNS masih belum mencukupi sehingga diangkatnya tenaga honorer menjadi solusi untuk memenuhi dan mencukupi kekurangan yang ada.

Pemerataan

Tujuan pemerataan adalah untuk mencapai efisiensi dan penggunaan tenaga kerja yang efektif dan adil. Seiring perkembangan teknologi informasi, manusia mulai menggunakan komputer dalam manajemen proyek, untuk memudahkan otomatisasi dan perhitungan. Transisi ke sistem manajemen terkomputerisasi membuat pengolahan sistem yang ada lebih cepat dan lebih efisien. Pesatnya perkembangan perangkat lunak juga mendorong peralihan dari manajemen tradisional ke sistem perangkat lunak manajemen yang lebih modern dengan meningkatkan dan mempercepat penyampaian layanan dan peralatan kepada masyarakat agar dapat berfungsi secara optimal.

Meratanya Pelaksanaan Pelayanan

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tentunya harus merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Meratanya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tentu menjadi indikator bahwa standar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat diberikan secara optimal. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan seksi formasi dan mutasi bapak Arief ade putra, S. Berdasarkan hasil wawancara di atas kita dapat menyimpulkan bahwa persebaran sarana dan prasarana yang ada di Kabupaten Sarolangun masih belum maksimal. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara bersama Kepala Sub Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Sarplangun bapak Sutadi S.Pd.\, tenaga pendidik paling banyak terdiri dari lulusan S1 yang berjumlah 831, sesuai peraturan yang berlaku kualifikasi tenaga pendidik minimal adalah S1 sedangkan masih terdapat tenaga pendidik yang masih belum memenuhi kualifikasi berjumlah 106 orang dan rata rata masih lulusan SMA sebanyak 72 orang, akan tetapi masih ada salah penginputan data dari beberapa sekolah sehingga adanya lulusan SD dan SMP yang terdata sebagai tenaga pendidik. Untuk pelaksanaan pelayanan masih didapat beberapa kekurangan baik dari segi sumber daya yang belum memenuhi kualifikasi maupun sarana dan prasarana yang belum memadai.

Meratanya Sumber Daya Pelaksana

Jumlah sumber daya pelaksana yang telah diperhitungkan selanjutnya harus disebar secara

merata. Pemerataan ini tentu menjadi hal penting agar setiap orang bisa mendapatkan sumber daya yang berkualitas meskipun di daerah terpencil. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Sarolangun bapak Sutadi S.Pd.I . setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Sarolangun, dapat dilihat guru BK hanya berjumlah 5 orang yang hanya ada di Kecamatan Sarolangun dan Kecamatan Singkut sedangkan pada 9 kecamatan lainnya masih kosong, dan untuk guru TIK hanya berjumlah 7 orang yang terdapat pada Kecamatan Sarolangun, Pelawan, dan Cermin Nan Gedang sedangkan pada kecamatan lainnya masih kosong.

Berdasarkan hasil wawancara dan data di atas dapat disimpulkan bahwa pemerataan sumber daya pelaksana masih belum maksimal dikarenakan beberapa kebutuhan yang belum bisa terpenuhi karena kurangnya lulusan sumber daya manusia pada bidang tersebut seperti bidang bagian konseling (BK) dan teknologi ilmu computer (TIK).

Responsivitas

Responsivitas (*responsiveness*) adalah kemampuan pemerintah untuk mengidentifikasi kebutuhan, menyusun agenda prioritas, mengembangkan program yang disesuaikan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas disini mengacu pada koordinasi program dan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Semakin banyak kebutuhan dan keinginan masyarakat yang diprogramkan oleh badan publik atau pemerintah, maka organisasi akan semakin responsive terhadap pelayanan yang diberikan.

Kemudahan Pelayanan

Salah satu indikator penting yang harus diperhatikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah kemudahan pelayanan yang diberikan. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tentu harus memperhatikan standar pelayanan yang telah ditetapkan, hal ini sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bapak Helmi, S.H., M.H. Dapat disimpulkan bahwa kemudahan pelayanan memiliki peran penting dalam meningkatkan standar pelayanan minimal pendidikan sehingga pelayanan yang diberikan dapat terlaksana dengan maksimal sehingga target yang telah ditentukan dapat dicapai.

Manfaat Pelayanan

Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah tentu harus diperhitungkan kebermanfaatannya bagi masyarakat. Hal ini penting untuk dilakukan agar sumber daya yang disiapkan dapat dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran. Pemerintah harus bisa memproyeksikan manfaat pelayanan yang diberikan. Hal ini dengan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMP N 17 Kabupaten Sarolangun bapak Idham Kholid, S.Ag, M.Pd.I . angka kelulusan yang setiap tahun nya selalu 100%, untuk angka melanjutkan sekolah dari SMP ke SMA dari tahun 2020 yang hanya 83,11% terus meningkat dari tahun 2021 mencapai 91,78% dan pada tahun 2023 92%, dan untuk SMP yang terakreditasi pada tahun 2020 mencapai 92,88% terjadi penurunan pada tahun 2021 90,53% dan di 2023 kembali meningkat menjadi 94,73% walaupun belum mencapai 100% akan tetapi terus meningkat dari tahun 2020 sampai tahun 2023. Berdasarkan hasil wawancara dapat dilihat bahwa manfaat pelayanan yang didapat sangat berpengaruh dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Sarolangun angka lulus sekolah, angka melanjutkan sekolah, dan angka melek huruf menjadi bukti nyata dari manfaat dari pelayanan pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan.

Ketepatan

Ketepatan merupakan faktor yang dibutuhkan seseorang untuk mencapai target yang diinginkan, akurasi dapat berupa gerakan yang dilakukan untuk mengoperasikan sistem sehingga sasaran dari perencanaan mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang diinginkan, karakteristik informasi yang relevan harus memiliki nilai prediktif dan disajikan

pada waktu yang tepat. Laporan keuangan sebagai sebuah informasi yang terkandung, dibuat tersedia untuk pengambilan keputusan sebelum informasi kehilangan kemampuannya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Jika terjadi keterlambatan pemberitahuan yang tidak beralasan, informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya.

Ketepatan Terlaksana Pelayanan

Salah satu hal yang harus diperhatikan agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat optimal adalah ketepatan terlaksana pelayanan. Tentunya pelayanan yang diberikan oleh pemerintah harus tepat sasaran. Dalam hal ini pemerintah harus dapat mengetahui masyarakat yang perlu dan penting untuk diprioritaskan dalam diberikan pelayanan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMP N 17 Kabupaten Sarolangun bapak Idham Kholid, S.Ag, M.Pd.I Dapat disimpulkan pelayanan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan standar pelayanan minimal pendidikan sudah terlaksana dengan tepat karena banyaknya perubahan baik dari segi tenaga pendidik maupun sarana dan prasarana yang terus berkembang pesat sesuai dengan target dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu sendiri.

Tujuan Pelayanan

Tujuan Pelayanan tentunya harus diperhatikan saat akan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini penting agar menjadi ukuran untuk mengetahui apakah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat telah terlaksana sesuai dengan tujuan atau tidak, tujuan Pelayanan menjadi dasar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara Kepala Sekolah SMP N 17 Kabupaten Sarolangun bapak Idham Kholid, S.Ag, M.Pd.I Manfaat pelayanan dapat dirasakan oleh SMP yang ada disarolangun baik dari peningkatan kualitas ataupun kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan maupun percepatan pembangunan sarana dan prasarana, akan tetapi jika dilihat dari akreditasi SMP yang ada dikabupaten Sarolangun rata rata masih B sehingga masih butuh banyak peningkatan agar banyaknya SMP yang bisa memiliki akreditasi A.

Faktor Penghambat Evaluasi Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal

Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di kabupaten sarolangun masih terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaannya, yaitu :

1. Kurangnya jumlah tenaga pendidik dibidang tertentu yang dapat didapatkan dari data kebutuhan jam mata pelajaran yang berarti masih kurangnya tenaga pendidik pada bidang mata pelajaran tersebut.
2. Sebaran tenaga pendidik yang tidak merata karena kurangnya jumlah tenaga pendidik dan kelebihan tenaga pendidik di bidang tertentu sehingga terdapat jam yang masih tidak terpenuhi untuk mata pelajaran tertentu dan masih ada mata pelajaran yang tenaga pendidik nya kekurangan jam karena terlalu banyak tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi yang sama.
3. Kapasitas Pendidikan, infrastruktur, sarana dan prasarana Pendidikan seperti buku ajar, alat peraga dan peralatan laboratorium masih terbatas dan belum merata sehingga kualitas pendidikan juga belum merata berdasarkan hasil wawancara, Laporan Kinerja dan portal data dari Dinas Pendidikan.
4. Proses belajar mengajar masih berorientasi pada penguasaan pengetahuan dan belum berorientasi pada peningkatan kompetensi siswa berdasarkan hasil

Upaya Yang Dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun

Peningkatan Sumber Daya Manusia

Peningkatan sumber daya manusia adalah aktifitas yang dilakukan guna mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada agar dapat lebih terampil dan optimal sehingga produktivitas bekerja semakin meningkat dan menciptakan perubahan positif terhadap tempat kerja, akan tetapi kekurangan dan tidak sesuai nya klasifikasi sumber daya manusia dapat memperlambat kinerja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di kabupaten sarolangun sehingga perlu adanya tindakan agar hal tersebut dapat di atasi, sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bapak Ibnu syatir, S.Pd Dari hasil wawancara di atas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun melakukan peningkatan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan melalui penerimaan CPNS dan PPPK yang diajukan kepada pemerintah daerah, pengangkatan tenaga honorer dengan menggunakan dana BOS, dan memberikan pelatihan berupa workshop, seminar ataupun diklat kepada tenaga pendidik agar memiliki sertifikat pendidik guna memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan.

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Fasilitas sekolah merupakan segala sesuatu dalam bentuk fisik mendorong pemberi layanan dan penerima layanan untuk mencapai target, sarana dan prasarana yang memadai akan mampu meningkatkan mutu pendidikan karena menunjang kegiatan proses kegiatan belajar mengajar untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu meningkatkan fasilitas sehingga dapat memberikan suasana yang nyaman dan meningkatkan produktivitas pelayanan, namun sebaliknya menjadi kendala yang dapat menghambat pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bapak Ibnu syatir, S.Pd pada hari rabu 11 januari 2023 pukul 14.00 WIB : Upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan sarana dan prasarana ialah dengan mengusulkan kepada kementerian pendidikan dan kebudayaan untuk pembangunan gedung sekolah dan fasilitas lainnya seperti ruang kelas, ruang laboratorium IPA, ruang laboratorium TIK, ruang tata usaha, ruang osis, ruang wc dan lainnya, mengusulkan rehabilitasi terhadap sarana dan prasarana yang sudah mengalami kerusakan. Dari hasil wawancara di atas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meningkatkan infrastruktur SMP dengan melakukan pembangunan untuk sarana dan prasarana yang kurang dan memperbaiki sarana prasarana yang sudah mulai rusak dengan mendata di setiap SMP yang ada di Kabupaten Sarolangun kemudian memberikan laporan dan menguskannya ke Kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi.

Diskusi temuan menarik lainnya (opsional): Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik melalui pelatihan, diklat, workshop dan sejenisnya secara berkelanjutan, agar pemahaman tentang pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan meningkat dan dilaksanakan sesuai bidang dan klasifikasinya, Penyelenggaraan SMP Terbuka sebagai alternatif sistem pendidikan formal yang menerapkan prinsip pembelajaran mandiri dan melaksanakan kegiatan Keiaksaraan Fungsional (Pemberantasan buta huruf) melalui PKBM untuk mengurangi jumlah anak buta huruf dan memberikan bantuan kepada siswa rintan putus sekolah/berasal dari keluarga kurang mampu melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dan bantuan lainnya untuk mengurangi jumlah anak yang putus sekolah di kabupaten sarolangun.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat peneliti jelaskan berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan pada BAB IV Hasil penelitian dan Pembahasan yaitu sebagai berikut: Evaluasi kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun dalam peimeinuhan Standar Peilayanan Minimal Peindidikan SMP sudah dilaksanakan cukup baik karena harus seisuai deingan peiraturan dan standar teiknis seirta mutu yang telah ditentukan. Berdasarkan teori Evaluasi dari William N Dunn dengan 6 dimensi menunjukkan bahwa masih kurangnya efektifitas pelaksanaan sehingga tidak tercapainya beberapa target pada perencanaan , penggunaan sumber dana yang cukup efisien , kecukupan yang belum terpenuhi karena kurangnya jumlah tenaga pendidik, Pemerataan yang tidak terlaksana baik dari tenaga pendidik maupun saran dan prasarana, dikarenakan kendala kurangnya kuantitas dan kualitas sumbeir daya manusia, seirta teirbatasnya sarana dan prasarana yang meimadai sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan yang diperlukan dan tidak meratanya pelaksanaan pelayanan dikarenakan kekurangan yang ada. Faktor-faktor yang meinghambat pemenuhan Standar Peilayanan Minimal SMP di Kabupaten Sarolangun ialah keikurangan jumlah teinaga peindidik yang meingakibatkan tidak meirata dan tidak seisuai kompeiteinsi teinaga peindidik deingan bidangnya, kurangnya fasilitas sarana dan prasarana baik dari infrastruktur maupun fasilitas peinunjang dan peindukung yang meimpeirmudah peindidikan, dan tingginya angka buta aksara dan lama seikolah anak anak di Kabupatein Sarolangun. Akan teitapi teirdapat faktor peindukung dalam peilaksanaannya juga, seipeirti meiningkatnya angka keilulusan, meiningkatnya angka lama seikolah, peingkatan peimbangunan infrastruktur dan banyaknya seikolah yang telah teakreditasi. Upaya yang sudah dilakukan oleih Dinas Peindidikan dan Keibudayaan Kabupaten Sarolangun yakni meingusulkan keipada peimeirintah pusat untuk peingangkatan teinaga peindidik dan teinaga peindukung peindidikan meilalui teis CPNS dan PPPK, peilaksanaan workshop, diklat, ataupun seiminar untuk para teinaga peindidik, peingadaan dan peingkatan sarana dan prasarana baik infrastruktur maupun fasilitas peindukung lainnya untuk peindidikan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*): Meimeinuhi jumlah keikurangan teinaga peindidik deingan meilakukan peineirimaan seisuai deingan formasi yang dibutuhkan baik dari CPNS maupun PPPK. Meiningkatkan kompeiteinsi teinaga peindidik meilalui peilatihan, diklat, workshop dan seijeinisnya secara berkelanjutan, agar peimahaman teintang peimeinuhan Standar Peilayanan Minimal Peindidikan meiningkat dan dilaksanakan seisuai bidang dan klasifikasinya, Penyelenggaraan SMP Terbuka sebagai altenatif subsistem pendidikan formal yang menerapkan prinsip pembelajaran mandiri dan melaksanakan kegiatan Keiaksaraan Fungsional (Peimbeirantasan buta huruf) meilalui PKBM untuk meingurangi jumlah anak buta huruf dan meimbeirikan bantuan keipada siswa reintan putus seikolah/beirasal dari keiluarga kurang mampu meilalui Program Indoneisia Pintar (PIP) dan bantuan lainnya untuk meingurangi jumlah anak yang putus seikolah dikabupatein sarolangun. Meilakukan peimbangunan sarana peindidikan seipeirti peimbangunan laboratorium, peirpustakaan dan lainnya, seirta peinyeidiaan alat peiraga dan peingadaan buku seikolah guna meiningkatkan akreditasi seikolah, peinyaluran dana bos yang optimal keipada seikolah agar dimanfaatkan deingan baik seipeirti untuk sarana atau penaimbahan peigawai.

Memperkuat keamanan website dan tetap waspada akan adanya aktivitas *hacking* yang kemungkinan terjadi serta meningkatkan keamanan server untuk meminimalisi serangan *cyber*.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Akhmad Fauzi, Rusdi Hidayat Nugroho A. *Manajemen Kinerja*. Surabaya: Airlangga University Press 2020
- Amir B. Marvasti, *Qualitative Reseach in Sociology* (London: SagePublication, 2004)
- Amstrong dan Baron dalam Wibowo. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali Pers - Rajagrafindo 2014
- Arikunto, Suharsimi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)
- Arthur Grager. *Pelayanan Administrasi Jakarta: Bina Aksara 1958*
- Berg, B.L., *Qualitative Research Method For The Social Science* (Tokyo: California State University, 2001)
- Hepikus. 2012. *Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Sekolah Dasar di Kabupaten Sanggau*. *Jurnal-PubliKA*. Volume 1, Nomor 1, Desember 2013.
- Herwin. 2012. *Analisis Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar (Studi Kasus: Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan)*. *Jurnal*. Program Studi Perencanaan Pembangunan Program Pasca Sarjana Universitas Andalas.
- George R. Terry *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara 2010 Ismail Nurdin dan Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya:
- Kothari, *Research Methodology: Methods and Technique (second revised edition)*, New Delhi: New Age International Publisher, 2004
- Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed PT. Remaja Rosdakarya (Bandung, 2014)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D* (Bandung: CV Alfabeta, 2017)
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi PENELITIAN* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019)

B. SUMBER LAIN

- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun Tahun 2021
- Rencana Strategis Perubahan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2022

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bappenas, 'Ringkasan Eksekutif RPJMN 2020-2024', 2020
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah
No. 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan
Daerah
Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal
Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal
Permendikbud No 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal
Pendidikan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar

D. JURNAL ILMIAH

- Ani Khoirina Nury, N. (2014). Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar SD Unggulan Muhammadiyah Kretek Kabupaten Bantul Tahun Ajaran 2013/2014.
- Esti Setiawati. 2018. *Studi Evaluatif Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Di Kabupaten Bantul. Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an, Vol. 4, Nomor 2, Januari 2018.*
- Subki, Agus Syafari dan Arenawati. 2021. *Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Di Provinsi Banten. Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, Vol. 06.*
- Damanik, Jafriansen, 'Keterkaitan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP)', *Jurnal Manajemen Pendidikan Indonesia*, 10.2 (2017), 180–203
- Hidayati, Nurlatifah, R Gunawan Sudarmanto, and Irawan Suntoro, 'IMPLEMENTASI PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DI SEKOLAH DASAR NEGERI 2 DONO ARUM KECAMATAN SEPUTIH AGUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH Oleh':, 1 (2013), 22–29
- Jonathan, Pangihutan. (2016). Evaluasi Program Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di SDN 10 Kedaung Kaliangke Jakarta Barat.
- Pilomonu, Sri Wulan. 2014. Evaluasi Pelayanan Minimal di Madrasah Ibtidaiyah Muhammad Unggulan Kota Gorontalo.
- Rosyidah, Laila Nur. 2016. Studi Implementasi Pelayanan Minimal Pendidikan Kesetaraan Paket B di Kota Magelang.
- Sabdaningtyas, Lilik, 'Model Evaluasi Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pada Satuan Pendidikan Jenjang SD', *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 22.1 (2018), 70
- Syafingi, Habib Muchsin, 'Konstitusionalitas Standar Pelayanan Minimal', *Jurnal Hukum Novelty*, 8.2 (2017), 216

Wijanarti, Novita, 'Evaluasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Berdasarkan Prinsip Good Governance Di Sekolah Dasar Negeri', *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 3.2 (2016), 207.

E. INTERNET

<https://disdikbud.sarolangunkab.go.id/>

: diakses pada 24 Agustus 2021

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/metro/id/profil/nilai-dan-budaya-organisasi/kebijakan-standar-pelayanan-minimum.html>

: diakses tanggal 24 Agustus 2021

<https://palopokota.go.id/content/uploads/data/standar-pelayanan-minimal/SPM-Dinas-Pendidikan.pdf>

: diakses tanggal 27 Agustus 2021

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/metro/id/profil/nilai-dan-budaya-organisasi/kebijakan-standar-pelayanan-minimum.html>

: diakses tanggal 27 Agustus 2021

[https://cimahikota.go.id/index.php/artikel/detail/1255-penerapan-standar-pelayanan-minimal-\(spm\)-di-pemerintah-daerah](https://cimahikota.go.id/index.php/artikel/detail/1255-penerapan-standar-pelayanan-minimal-(spm)-di-pemerintah-daerah)

: diakses tanggal 27 Agustus 2021

[https://cimahikota.go.id/index.php/artikel/detail/1255-penerapan-standar-pelayanan-minimal-\(spm\)-di-pemerintah-daerah](https://cimahikota.go.id/index.php/artikel/detail/1255-penerapan-standar-pelayanan-minimal-(spm)-di-pemerintah-daerah)

: diakses tanggal 27 Agustus 2021